

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau adalah dokumen perencanaan komprehensif yang berwawasan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau setiap tahun sampai dengan tahun 2021 dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.

Renstra berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, yang terkait dengan Pemberdayaan dan Pemerintahan.

Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 adalah rumusan visi, misi agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan dengan memperhatikan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat serta kondisi daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma baru yang menitik beratkan pada pembangunan yang bersifat *bottom up (people centred development)* memberikan indikasi bahwa pemberdayaan memegang peranan yang strategis dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah.

1.2.Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, peraturan perundangan yang digunakan untuk rujukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pendaya Gunaan Teknologi Tepat Guna ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau ;
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Berau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau ini dimaksudkan sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

Penyusunan rencana strategik ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.

Rencana Strategis bertujuan untuk memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, isi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Berau

1.4.Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN BERAU
	Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
	Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau dan Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
	Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN BERAU
	Bab ini merupakan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Berau
BAB VIII	PENUTUP
TABEL - TABEL	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMK

2.1.1. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, DPMK mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat serta prasarana dan sarana kampung.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan dan pemasaran hasil usaha serta penerapan kerjasama teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam.

Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemerintahan kampung yang meliputi pengelolaan keuangan kampung, fasilitas administrasi pemerintahan kampung serta pengembangan kapasitas pemerintahan kampung.

2.1.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, DPMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- d. pelaksanaan tugas administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

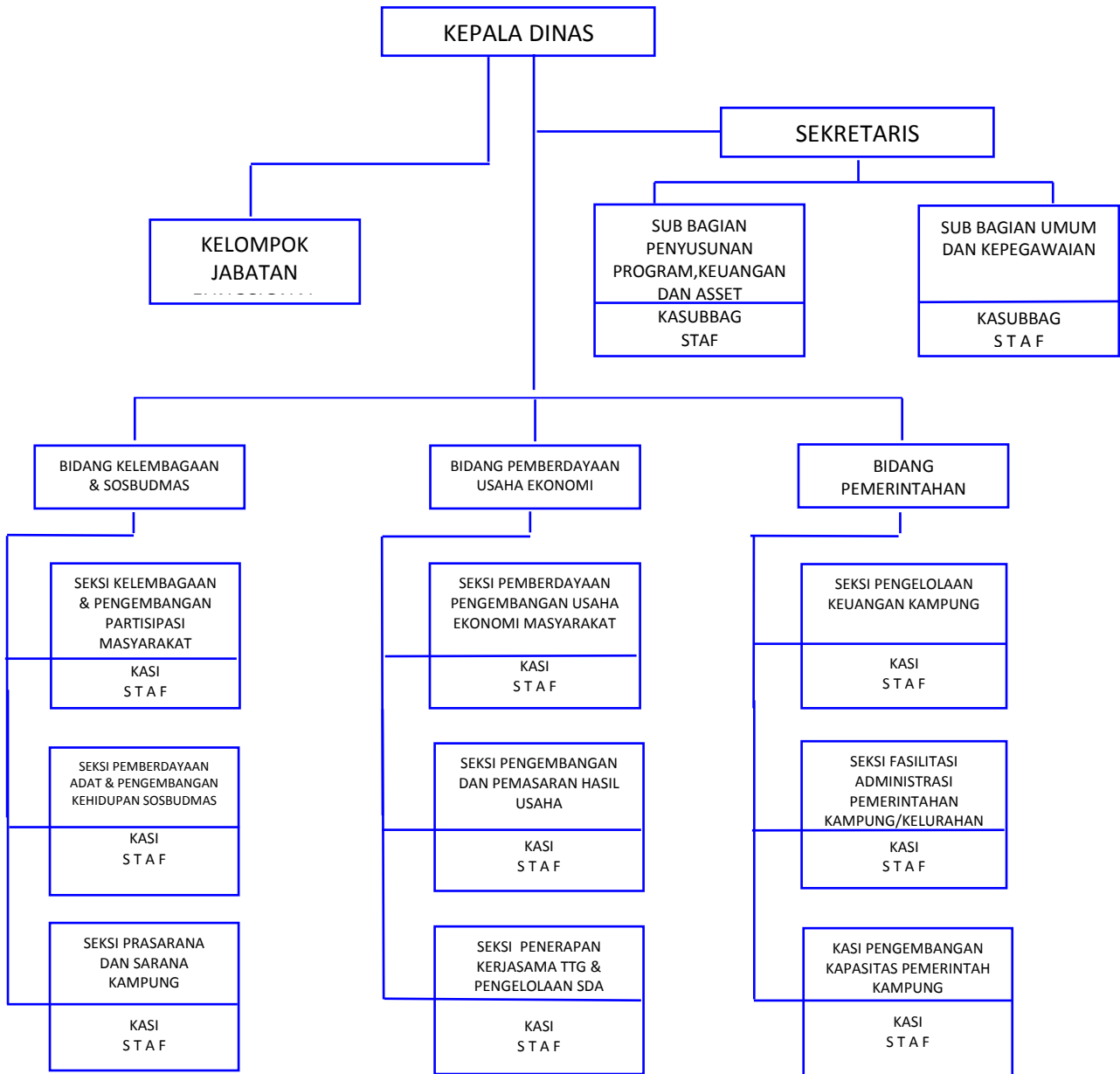
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2016, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Asset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - b. Seksi Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Kampung

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran Hasil Usaha
 - c. Seksi Penerapan Kerjasama Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
5. Bidang Pemerintahan Kampung, membawahi :
 - a. Seksi Pengelola Keuangan Kampung
 - b. Seksi Fasilitas Administrasi Pemerintah Kampung
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kampung
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.

STRUKTUR ORGANISASI



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau memiliki sumber daya aparatur sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural Eselon II : 1 (satu) Orang
- Pejabat Struktural Eselon III : 4 (empat) Orang
- Pejabat Struktural Eselon IV : 11 (sebelas) Orang
- Pejabat Non Struktural : 29 (dua sembilan) Orang

Rincian data pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Uraian	Tingkat Kegiatan							JUMLAH
		S3	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktural								
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	1	2	-	-	-	-	3
	Kasubbag / Kasi	-	1	6	1	3	-	-	11
	Sub Jumlah	-	3	9	1	3	-	-	16
2	Tenaga Pelaksana								
	- Pegawai	-	2	15	-	11	1	-	29
	Sub Jumlah	-	-	12	-	5	1	-	29
	Jumlah	-	-	21	1	8	2	-	45

Berdasarkan analisa beban kerja dibandingkan dengan banyaknya Sumber Daya Manusia yang ada, jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan dan dari segi tingkat pendidikan cukup seimbang komposisi perbandingan antara sarjana dengan non sarjana.

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, pembangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMK

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana tugas pembantu Bupati Berau dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan Kampung.

Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dituntut untuk menjabarkan secara akurat terhadap tugas pelayanan, mengingat perkembangan pada setiap tahap pembangunan senantiasa bersifat dinamis.

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dalam capaian kinerja pelayanan sebanyak 123 LPM sudah terlatih dalam rangka untuk perencanaan pembangunan di tingkat Kampung. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, 3 kelompok TTG yang sudah dibentuk, di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Pulau Derawan yang secara bertahap akan memfasilitasi di setiap kecamatannya dalam pemetaan TTG. Dalam bidang pengembangan ekonomi pedesaan, telah terdata sebanyak 7 pasar Kampung yang tersebar di 12 Kecamatan. Untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) dari tahun 2009 sebanyak 12 Kecamatan.

Selanjutnya untuk kegiatan Penyusunan Data Profil Desa/Kampung/ Kelurahan, secara bertahap telah dilaksanakan dan sampai saat ini baru 1 (satu) Kampung sebagai pilot projek, yaitu Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung. Penyelenggaraan Lomba Desa, setiap tahun dilaksanakan dengan mengikutkan peserta sebanyak 6 (enam) Kampung dengan menggunakan 8 indikator meliputi pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan PKK.

Dalam pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) setiap tahun rutin dilaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengadministrasian dan pelaporan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan budaya kegotong royongan dalam pembangunan Kampung, setiap tahun dicanangkan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disalah satu Kampung terbaik (Juara Lomba Kampung).

Realisasi capaian untuk kegiatan Pelatihan dan Pendidikan bagi aparatur pemerintah Kampung dalam bidang Pengelolaan Keuangan Kampung sebanyak 100 orang telah mengikuti pelatihan.

Bahwa dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau masih banyak kegiatan yang tidak terealisasi karena mengutamakan prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dalam kurun waktu 4 (empat) tahun selengkapny dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Indikator Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi	Kondisi Sekarang
1	Juara Umum Lomba Kampung TK Nasional	Kampung Gurimbang Kecamatan Gunung Tabur
2	Jumlah Aparatur Kampung yang terlatih dalam Pengelolaan Keuangan Kampung.	300 Orang Aparatur Kampung terlatih Pengelolaan Keuangan Kampung
3	Terealisasinya Alokasi Dana Kampung	100 Kampung (Tahap I) 90 Kampung (Tahap dan II)
4	Terealisasinya Dana Bagi Hasil Pajak	90 Kampung

5	Terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)	3 Kecamatan
6	Terbentuknya Pasar Desa/Kampung	di 5 Kampung
7.	Penilaian LAKIP Tahun 2016	B

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Ketergantungan masyarakat dalam proses pembangunan maupun dalam pembangunan Kampung masih bertumpu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau melalui beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan secara bertahap diharapkan mampu untuk merubah kondisi masyarakat menjadi berdaya dalam proses pembangunan sehingga pemberdayaan masyarakat dan Kampung ini benar-benar dapat terwujud.

Namun demikian dalam melaksanakan program maupun kegiatannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dengan bertumpu pada capaian kinerja masih menghadapi banyak tantangan.

Dalam upaya mencermati kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dapat dianalisis melalui analisa lingkungan internal maupun eksternal sederhana dengan menggunakan instrumen SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Treatment*), yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan. Adapun faktor internal (Kekuatan, Kelemahan) dan faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) dapat dilihat dibawah ini :

Lingkungan Internal :

1) Kekuatan (*Strenght*).

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (Aparatur) yang berpendidikan memadai.
- Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
- Tersedianya kendaraan dinas yang memadai.
- Dukungan pimpinan dalam memegang komitmen untuk pelaksanaan tugas.

2) Kelemahan (*Weakness*).

- Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang profesional.
- Masih kurangnya aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan Eksternal :

1) Peluang (*Opportunity*).

- Komitmen pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui visi dan misinya.
- Adanya alokasi dana untuk program pemberdayaan masyarakat baik dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- Terbentuknya lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di Kampung.
- Komitmen untuk meningkatkan paradigma “Desa Membangun” sebagai pelengkap paradigma “Membangun Desa”.

2) Tantangan (*Treatment*).

- Tuntutan peningkatan pelayanan dan fasilitasi bantuan kepada masyarakat dan Kampung cukup tinggi.
- Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan perKampung di Kampung masih kurang.
- Tingkat kemampuan dan pengetahuan aparatur pemerintah Kampung dalam pengelolaan administrasi pemerintah masih rendah.
- Kemandirian masyarakat semakin menurun (semakin tergantung).
- Belum (adanya) optimalnya peran kader pembangunan masyarakat di Kampung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMK

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dilihat dari aspek beban kerja tidak dapat terlepas dengan aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung harus mampu menjabarkan terhadap tugas pokok sebagai fungsi pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan kampung. Untuk itu kemampuan aparatur harus selalu ditingkatkan guna pencapaian pelayanan yang baik didasarkan pada mekanisme yang ada.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

1. Masih adanya aparatur yang kurang memahami terhadap Tupoksi dimasing-masing bidang tugasnya

3.1.2 Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.

1. Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif.
2. Pemanfaatan fungsi lembaga kemasyarakatan Kampung masih kurang.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang optimal khususnya dukungan swadaya masyarakat.
4. Belum tersedianya data profil Kampung yang memadai / kelurahan yang akurat.
5. Rendahnya budaya gotong royong masyarakat pada masyarakat Kampung dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.1.3 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

1. Peran dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat belum optimal.
2. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penyusunan perencanaan.
3. Keterbatasan anggaran dalam mendukung program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
4. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)

3.1.4 Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

1. Kurang Harmonisnya Aparatur Pemerintah Kampung dan Lembaga lembaga yang ada di Kampung.
2. Perubahan Regulasi tentang Pemerintahan Desa/Kampung.
3. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan aparat pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati Berau dan Wakil Bupati Berau terpilih sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 sebagaimana berikut :

Visi : "MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN “

MISI

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Berkaitan dengan visi dan misi tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau sebagai pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung, mendorong tercapainya visi dengan melaksanakan misi ke-4.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau untuk melaksanakan tugas tersebut melalui :

1. Pemberian bantuan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Kampung.
2. Pembinaan Kampung dalam peningkatan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Peningkatan Alokasi Dana Kampung (ADK) secara proporsional.
4. Peningkatan fungsi kelembagaan di Kampung.
5. Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

Adapun untuk program pendukung pelaksanaan misi tersebut adalah :

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi desa.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
5. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam RPJMN 2015-2019, Merumuskan Nawa Kerja Prioritas sebagai Berikut :

1. Peluncuran Desa Mandiri di 5000 Desa pada Tahun 2015.
2. Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang.
3. Pembentukan dan Pengembangan 5000 Bumdes
4. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan pedesaan.
5. Pembangunan Infrastruktur Jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5000 desa mandiri.

6. Menyiapkan Implementasi penyaluran dana desa 1.400 milyar per desa secara bertahap.
7. Penyaluran modal bagi koperasi/umkm di 5000 desa
8. Pilot Projek system pelayanan public jaringan koneksi online di 5000 desa.
9. “Save vilages” di daerah Perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Berau adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di Wilayah Kabupaten Berau yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang. Tujuan penilaian ruang wilayah Kabupaten Berau adalah terwujudnya Kabupaten Berau sebagai Bumi Batiwakal berbasis keunggulan pertanian dan Agrobisnis yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara tidak langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau untuk mendukung semua kebijakan dan strategi penataan ruang.

Terkait dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau ikut bertanggung jawab dalam penataan permukiman Kampung dengan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau yang jelas diuraikan sebelumnya, maka dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dari uraian identifikasi permasalahan dan telaahan Buku Putih RPJMD, maka beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kampung dalam pembangunan.
2. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di Kampung.
4. Kurang optimalnya peran dan fungsi lembaga pemerintah dan kemasyarakatan Kampung.
5. Kurangnya pengembangan usaha ekonomi di Kampung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Sesuai dengan Misi Kepala Daerah, maka tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan kampung dalam membangun diri dan lingkungannya guna mewujudkan kesejahteraan”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kampung
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa
3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan dampak pelayanan dan koordinasi pembangunan secara nyata dimasyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Rata-rata IKM Pemerintah Kampung	80	85	85	85	90	90
2	Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan kampung guna mewujudkan kesejahteraan Indikator tujuan: Indeks pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun di Tipologi Berkembang (kampung)	9	12	15	18	21	24
			Indeks Desa Membangun di Tipologi Maju (kampung)	0	0	0	0	0	2
			Indeks Desa Membangun di Tipologi Mandiri (kampung)	0	0	0	0	0	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau, strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal dan eksternal dalam 5 tahun kedepan.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau terdiri dari :

5.1.Strategi

Strategi yang diterapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau adalah strategi percepatan, pemerataan, kesinambungan dan interkoneksi melalui strategi :

“ Peningkatan kualitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa”

5.2.Arah Kebijakan.

Arah kebijakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan adat
2. Pembentukan/revitalisasi BUMDes
3. Pemberdayaan dan pemasaran hasil usaha masyarakat
4. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi dan kapasitas pemerintahan kampung

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau

Visi RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021: Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.				
Misi II : Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan
Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan kampung guna mewujudkan kesejahteraan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan adat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa			Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
			Pembentukan/revitalisasi BUMDes	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Pemberdayaan dan pemasaran hasil usaha masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi dan kapasitas pemerintahan kampung	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritahan Desa		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasarannya DPMK Kabupaten Berau.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan sebagaimana terlampir :

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN BERAU

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengelolaan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang disajikan hanya yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

Dengan demikian indikator yang lebih spesifik dan khas Organisasi Perangkat Daerah namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau, karena merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK), atau Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Organisasi Perangkat Daerah.

Berikut Indikator Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Berau.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah LPM aktif berpartisipasi dalam Pembangunan	30	60	70	80	85	90	100	100
2	Jumlah Usaha Ekonomi produktif masyarakat kampung yang aktif	10	30	40	45	60	80	100	100
3	Jumlah Kampung yang Dibina	15	60	65	70	80	90	100	100
4	Persentase Kampung yang mampu menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai peraturan	56	60	65	65	65	65	65	65

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau ini disusun dengan memperhatikan substansi materi Buku Putih RPJMD, Visi Misi Bupati Wakil Bupati Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021. Dalam penjabaran Program dan Kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang/Sub Bidang dan Seketaris/Sub Bagian.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau telah mempunyai dokumen rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yang dapat dijadikan pedoman dan arah untuk pelaksanaan kegiatan dengan harapan bisa menciptakan hasil guna dan daya guna sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Renstra ini hendaknya mendapatkan dukungan penuh dari semua jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau dan terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dari semua Dinas Instansi terkait demi pencapaian Visi dan Misi.

Tanjung Redeb, 20 Desember 2017

Kepala Dinas,

Ir. H.Ilyas Natsir, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 105

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019 - 2021**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18			
		2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				9.155.001.350		6.467.816.000		6.573.539.000		4.145.217.264		4.143.870.246		4.155.446.661		34.208.856.721			
Meningkatkan dampak pelayanan dan koordinasi pembangunan secara nyata di masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	2 07 01 01	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	80	1.095.865.000	85	938.402.000	85	1.060.259.000	85	680.217.264	90	678.870.246	90	680.446.661	90	5.134.060.171			
		2 07 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	300 Lbr	300	3.500.000	250	2.500.000	80	2.500.000	85	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	915	16.000.000			
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon dan surat kabar/majalah	12 Bln	12	83.500.000	12	140.174.000	12	106.500.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	630.174.000
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	16 Unit	13	122.500.000	14	135.000.000	19	153.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	710.500.000
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga pengadministrasian kegiatan Administrasi dan Keuangan kantor	18 Org	20	181.760.000	10	106.207.000	15	116.839.000	15	102.000.000	15	102.000.000	15	102.000.000	15	102.000.000	15	710.806.000
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	10 Unit	10	5.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	35.500.000
			09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	9 Unit	9	8.000.000	9	5.000.000	20	10.000.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	500.000	20	24.500.000
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	10 Jenis	10	27.500.000	10	21.520.000	30	16.520.000	30	17.817.264	30	16.470.246	30	18.046.661	30	18.046.661	30	117.874.171
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	15 Jenis	15	7.850.000	15	9.000.000	20	7.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	110	32.850.000
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	6 Item	6	3.500.000	5	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	3.000.000	15	18.500.000
			13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	5	40.000.000	3	15.000.000	15	97.000.000	15	0	10	0	15	0	63	152.000.000		
			15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Majalah/Koran Bulanan	4 Jenis	4	10.800.000	4	7.796.000	5	14.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	110	47.596.000		
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tamu Kantor	150 Org	150	37.000.000	250	20.000.000	300	20.000.000	300	10.000.000	500	10.000.000	300	10.000.000	1.800	107.000.000		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	25 Kali	25	338.170.000	20	190.000.000	50	175.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	60	100.000.000	255	1.003.170.000		
			19	Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	35 Kali	35	85.284.500	20	144.305.000	150	200.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	655	729.589.500		
			20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	4 Org	4	141.000.500	4	131.400.000	4	131.400.000	4	131.400.000	4	131.400.000	4	131.400.000	4	131.400.000	4	798.000.500
				2 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Luas gedung kantor yang terpelihara	7.980 m2								5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	12 Bln	-						12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18		
		2 07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	75 %	75				75		75	0	80	0	80	0	80		0	
			02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	Stell					50		50	0	50	0	50	0	50	0	50	
				Jumlah Pengadaan Pakaian Batik	Stell					50		50	0	50	0	50	0	50	0	50	
				Jumlah Pengadaan Pakaian Putih	Stell					50		50	0	50	0	50	0	50	0	50	
				Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	Stell					50		50	0	50	0	50	0	50	0	50	
				Jumlah Pengadaan Pakaian Waskat	Stell					50		50	0	50	0	50	0	50	0	50	
		2 07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	60 %	50	375.093.800	60	0	65	0	65	0	70	0	75	0	75		375.093.800	
			1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur DPMK	5 Org	9	45.500.000		0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	49	45.500.000
			4 Orientasi Penguatan Tugas-Tugas Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya orientasi tugas Pemberdayaan Masyarakat Bagi Aparat DPMKK, Kecamatan dan Kelurahan	50 Org	46	193.765.000		0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	186	193.765.000
			6 Fasilitasi rakor pemerintahan desa se Kalimantan Timur	Jumlah Peserta Rakor	0 Org	100	135.828.800														135.828.800
		2 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai Lakip/LKj-KP	%	68,8	195.000.000	65,12	5.000.000	70	5.000.000	73	60.000.000	75	60.000.000	78	70.000.000	78		70.000.000	
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 Dok		0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	25		40.000.000	
			4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	0 Dok		0		0		0	2	0	2	50.000.000	2	0	6		50.000.000	
			5 Sosialisasi Realisasi Kinerja SKPD	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pameran	10 Hr	10	35.000.000		0	10	0	10	0	10	0	10	0	50		35.000.000	
			6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Laporan monitoring	5 Dok	5	100.000.000		0	5	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	25		260.000.000	
			9 Penyusunan dokumen perencanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	- Dok	10	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		60.000.000
			10 Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	0 Dok		0		0		0	2	0	2	0	2	50.000.000	6		50.000.000	
Meningkatkan kemandirian masyarakat dan kampung guna mewujudkan kesejahteraan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	2 07 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah LPM berpartisipasi aktif dalam pembangunan	50 LPM	60	1.235.998.384	70	472.974.000	80	620.000.000	85	300.000.000	90	300.000.000	100	300.000.000	100		3.228.972.384	
			3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa	Jumlah kampung yang menerima informasi hasil program pemberdayaan masyarakat desa	12 Kec	12	104.709.724		0		0		0		0		0	12		104.709.724	
			4 Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terseleenggaranya Bulbak	1 kali	1	523.740.000	1	99.660.000	1	400.000.000	1	0	1	0	1	0	1		1.023.400.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD						
							2016		2017		2018		2019		2020				2021				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18				
			5	Rakor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah kampung yang mengikuti Rakor	100	Kamp	123	10.985.000		0		0		0		0		0	10.985.000			
			6	Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan masyarakat (KPM)	Jumlah Pengurus LPM yang dilatih	105	Org	85	219.828.560	40	73.314.000	50	70.000.000	60	0	70	0	80	0	385	363.142.560		
			7	Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Keberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pengembangan Web DPMK	1	Web	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
			8	Pengembangan dan Pengelolaan Data Profil Kampung/Desa dan Kelurahan	Jumlah Data Profil Kampung yang akurat	0	Kamp		0	1	200.000.000	1	150.000.000	50	150.000.000	60	150.000.000	70	150.000.000	80	800.000.000		
			10	Penilaian PMTAS	Pemberian makanan tambahan anak sekolah	13	Kec	13	213.560.000			0		0		0		0		0	213.560.000		
			11	Koordinasi PKK	Pelaksanaan koordinasi dengan PKK Kecamatan	4	Kec	12	97.085.000		0		0		0		0		0		97.085.000		
			12	Survey dan Pendataan Kriteria Perkembangan Kampung/ Kelurahan	Jumlah Kampung/ Kelurahan yang di Survey	0	kamp	6	66.090.100	10		0	10	0	10	0	10	0	10	0	56	66.090.100	
			13	Pengembangan Sistem Aplikasi Perdesaan Online	Jumlah kampung yang mengaplikasikan desa online	0	Kamp			60	100.000.000	70		0	70	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
			15	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Adat Kampung/ Desa	Meningkatnya kampung/desa yang berbasis Adat Istiadat dan Budaya	0	Kamp					0	5		0	7		0	10		0	12	0
			16	Pembinaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Jumlah LPM nya dibina	0	LPM					0	35	50.000.000	50	50.000.000	75	50.000.000	75	150.000.000			
			17	Penilaian LPM Prestasi	Jumlah Kecamatan yang mengikuti penilaian LPM	13	Kec				0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0
			18	Pengembangan dan Penetapan Kampung Mandiri	Jumlah Kampung yang Mandiri	0	Kamp	0		27				35	0	40	0	50	0	50	0	50	0
		2 07 01 19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya kualitas peran perempuan (TP-PKK) dalam proses pembangunan		%	11,6	0	11,8	1.500.000.000	12	3.000.000.000	12,2	1.450.000.000	12,5	1.450.000.000	13	1.450.000.000	13	8.850.000.000		
			2	Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan PKK	Jumlah PKK Kecamatan yang dibina	13	Kec		0	13	1.500.000.000	13	3.000.000.000	13	1.400.000.000	13	1.400.000.000	13	1.400.000.000	13	1.400.000.000	13	8.700.000.000
			4	Koordinasi Kegiatan PKK di Kampung	Pelaksanaan koordinasi dengan PKK di Kampung	0	Kamp		0		0		0	12	50.000.000	10	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000		
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa	2 07 01 16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah kelompok usaha Ekonomi Produktif masyarakat kampung yang aktif	50	Usaha	50	628.200.516	34	150.000.000	45	100.000.000	60	400.000.000	80	400.000.000	100	400.000.000	100	1.971.166.716		
			2	Pembentukan dan Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes	Jumlah pengelola Bumdes yang mendapat pelatihan	150	Org	100	185.314.516	100		0	99	0	99	0	99	0	99		596	185.314.516	
			2	Inventarisasi dan pengembangan pengelolaan pasar desa/ kampung	Jumlah Pasar kampung yang aktif	0	Pasar					10	0	15	100.000.000	30	100.000.000	50	100.000.000	50	300.000.000		
			5	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Permodalan di Perdesaan/Kampung	5	unit	5	95.940.000	20		30	0	50	0	55	0	60	0	60	95.940.000		
			6	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro dan Menengah Perdesaan	Jumlah UMKM Yang terfasilitasi dengan Pihak Swasta	0	Kec	12	107.033.800	12		12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18		
			8	Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Manajemen BUMK/Bumdes	Jumlah BUMK/Bumdes yang terfasilitasi dengan baik	0	unit			30	150.000.000	50	100.000.000	70	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	550.000.000
			13	Pendataan Potensi Pasar Desa dan Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa	Tersedianya Data Potensi Pasar Kampung yang akurat di Kec	12	Kec	12	135.549.800	4	0	6	0	8	100.000.000	10	100.000.000	12	100.000.000	12	435.549.800
			17	Partisipasi Pameran Produk Unggulan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa /Kampung	Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan masyarakat	0	Kec	12	104.362.400	12	0	12	0	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	404.362.400
		2 07 01 17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Jumlah kampung yang dibina	50	Kamp	60	4.438.128.000	65	3.071.440.000	70	1.078.280.000	80	1.000.000.000	90	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	11.587.848.000
			6	Pemilihan, Pelantikan dan Pembinaan Kepala Desa/ Kampung	Kecamatan yang mengikuti pemilihan, pelantikan dan pembinaan Kepala Desa/Kamp	0	Kec	12	343.170.000	12	2.422.160.000	12	425.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	4.390.330.000
			8	Pelaksanaan KKN Mahasiswa	Jumlah Kampung yang terfasilitasi KKN Mahasiswa	65	Kamp	56	720.301.000	57	98.280.000	57	83.280.000	57	150.000.000	57	150.000.000	57	150.000.000	57	1.351.861.000
			10	Pelaksanaan Lomba Kampung dan Kelurahan	Jumlah Kampung dan Kelurahan yang berhasil dalam Pembangunan Kampung	12	Kamp	12	559.226.000	12	206.000.000	12	245.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	72	1.460.226.000
			11	Pemekaran dan Penataan Kampung	Jumlah Kampung yang di tata	2	Kamp	2	111.279.200	2	50.000.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	161.279.200
			12	Penyusunan Kebijakan dan Validasi Data Alokasi Dana Desa /Kampung (ADD/K)	Jumlah Regulasi ADK dan data dasar ADK yang disusun	6	Reg	10	155.914.800	3	70.000.000	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	10	275.914.800
			13	Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kampung	Jumlah Kampung yang saprasnya terinventarisir	0	Kamp	0					0	20	0	30	0	60	0	80	0
			14	Fasilitasi dan Pendamping Desa/ Kampung	Jumlah Kampung yang terfasilitasi	0	Kamp	90	151.287.000	90	75.000.000			50	0	60	0	70	0	90	226.287.000
			17	Peningkatan Kualitas SDM Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG	3	Kec	4	200.000.000	5	100.000.000	7	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	675.000.000
			18	Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemenuhan Ketersediaan Air Bersih	Terdistribusinya wadah penampung air untuk masyarakat kurang mampu/miskin	0	KK	500	2.196.950.000		Rp -		0	0	0	0	0	0	0	500	2.196.950.000
			19	Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelola Keuangan Kampung	Jumlah Kecamatan/Kampung	0	Kamp	0		100	50.000.000	100	0	99	50.000.000	99	50.000.000	99	50.000.000	99	200.000.000
			20	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa/ Kampung	Jumlah kampung yang terfasilitasi perencanaan pembangunan desa/kampung	0	Kamp	0				50	200.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	100	350.000.000
			21	Fasilitasi Pemilihan BPK Terbaik	Jumlah lembaga BPK yang dinilai	0	Lemb	0		0		12		12		12		12		12	
			22	Fasilitasi Pembentukan dan Pengangkatan Perangkat Kampung	Jumlah calon perangkat kampung yang diangkat menjadi kepala kampung	0	Org	0		0		50		50		50		50		150	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18			
			x	Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kampung yang aktif	0	Kamp	0	0	100	0	100	0	99	100.000.000	99	100.000.000	99	100.000.000	99	300.000.000	
			xx	Penyusunan Kebijakan/Validasi ADD/ADK dan Pemerintahan Desa/Kampung	Jumlah regulasi yang disusun dan disosialisasikan	0	Reg	0	0	0	0	0	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	21	200.000.007		
	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	2 07 01 18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase kampung yang mampu menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sesuai peraturan	20	%	20	1.186.715.650	30	330.000.000	40	710.000.000	45	250.000.000	50	250.000.000	60	250.000.000	70	2.976.715.650	
			2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan	Jumlah Aparatur Kampung yang dilatih	0	org	100	409.188.450	0	0	0	99	0	99	0	99	0	397	409.188.450		
			3	Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa bagi Badan Perwakilan Kampung, Aparat Desa dan TPK	Jumlah Aparatur BPK yang dilatih	100	org	0	0	0	0	99	0	99	0	99	0	99	0	297	0	
			4	Pelatihan Pengelolaan Data Profil Kelurahan dan penyusunan RPJMK	Jumlah aparatur kampung yang dilatih	145	org	110	301.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	301.242.000	
			5	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa/ Kampung	Jumlah RPJM Kampung Yang disusun dengan Baik	0	Kamp	0	15	50.000.000	40	0	70	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000		
			7	Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung (ADK)	Jumlah Kampung yang dibina ADK	0	Kamp	0	50	100.000.000	60	250.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	650.000.000		
			8	Penilaian LPM Prestasi	Jumlah Kecamatan yang LPM nya mengikuti penilaian	13	Kec	13	217.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.500.000	
			9	Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Jumlah regulasi yang disusun dan disosialisasikan	2	Reg	10	258.785.200	6	30.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	21	288.785.200	
			10	Pelatihan Pengelolaan Asset Pemerintahan Desa/ Kampung	Jumlah Aparatur Kampung yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	0	Org	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	400	0	
			12	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kampung/ Desa	Jumlah Kampung SAKIP nya baik	0	Kamp	0	12	0	6	0	12	0	12	0	12	0	12	0	54	0
			17	Verifikasi dan Penyelarasan RPJMK	Tercapainya Pemahaman Pemerintah Kampung dalam Penyelarasan RPJMK	0	Kamp	0	20	150.000.000	30	0	50	50.000.000	70	50.000.000	100	50.000.000	100	300.000.000		
			18	Pelatihan Revolusi Mental bagi Kepala Kampung	Adanya sikap keteladanan dan berkeyakinan kepada Tuhan YME	0	orang	0	0	0	0	400.000.000	99	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	
			19	Fasilitasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi penggunaan Aplikasi Siskeudes	0	Kec	0	12	60.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	210.000.000		
			xx	Pembinaan Mental bagi Kepala Kampung	Adanya sikap keteladanan dan berkeyakinan kepada Tuhan YME	0	orang	0	0	0	0	0	99	0	99	0	99	0	99	0	0	